

**PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(Studi Di Desa Tulung Agung Kecamatan Gading Rejo Kabupaten
Pingsewu)**

(Skripsi)

Oleh

RIZA FIRTALIA



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

**(Studi Di Desa Tulung Agung Kecamatan Gading Rejo Kabupaten
Pingsewu)**

Oleh:

RIZA FIRTALIA

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan lembaga keuangan desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya. Oleh karena itu didalam membangun masyarakat desa terutama dalam bidang sosial ekonomi masyarakat dibutuhkan seorang pemimpin, dalam hal ini adalah Kepala Desa yang diharapkan berfungsi sebagai motivator, fasilitator dan mobilisator untuk mencapai tingkat hidup yang lebih baik. Sebagai seorang pemimpin, kepala desa diberikan tugas untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di desanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Kepala Desa Tulung Agung Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu dalam pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan Peran Kepala Desa Tulung Agung dalam melakukan pemberdayaan masyarakat sudah baik terlihat dari beberapa program pemberdayaan yang ada di desa yaitu pemberdayaan secara fisik seperti pembangunan infrastruktur: saluran air, jalan setapak, pemberian bantuan bibit tanaman pertanian, sedangkan pemberdayaan secara non fisik meliputi penyuluhan-penyuluhan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.

Kata Kunci : Peran, Kepala Desa, Pemberdayaan Masyarakat

ABSTRACT

THE ROLE OF THE VILLAGE HEAD IN IMPROVING COMMUNITY EMPOWERMENT

(Study in Tulung Agung Village, Gading Rejo District, Pingsewu Regency)

**By:
RIZA FIRTALIA**

Village community empowerment is one of the efforts to improve community welfare, through several activities, including increasing community initiatives and self-help, environmental and housing improvement, development of village economic enterprises, development of village financial institutions, as well as activities that can increase the community's ability to increase income. the production. Therefore, in building a village community, especially in the socio-economic field, a leader is needed, in this case the Village Head who is expected to function as a motivator, facilitator and mobilizer to achieve a better standard of living. As a leader, the village head is given the task to prosper the people in his village. This study aims to find out how the role of the Tulung Agung Village Head, Gading Rejo District, Pringsewu Regency in community empowerment. This study uses a qualitative approach. From the results of the research that has been carried out, it can be concluded that the role of the Tulung Agung Village Head in empowering the community has been good, it can be seen from several empowerment programs in the village, namely physical empowerment such as infrastructure development: water channels, footpaths, provision of agricultural plant seeds, while Non-physical empowerment includes counseling in the context of increasing community knowledge and skills.

Keywords: Role, Village Head, Community Empowerment

**PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(Studi Di Desa Tulung Agung Kecamatan Gading Rejo
Kabupaten Pingsewu)**

Oleh

Riza Firtalia

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat mencapai gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(Studi di Desa Tulung Agung Kecamatan Gading Rejo
Kabupaten Pingsewu)**

Nama Mahasiswa : **Riza Firtalia**

No Pokok Mahasiswa : **1746021031**

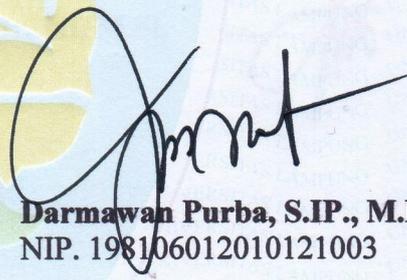
Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

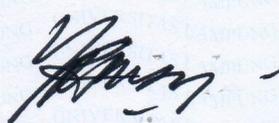
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP. 196112181989021001


Darmawan Purba, S.IP., M.IP.
NIP. 198106012010121003

2. Ketua Jurusan Ilmu Perintahan


Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP. 196112181989021001

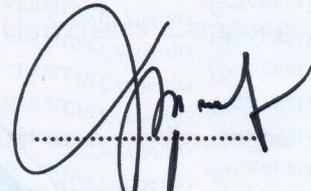
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

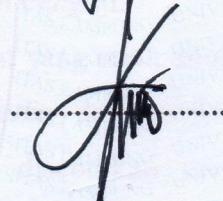
Ketua : Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.



Sekretaris : Darmawan Purba, S.IP., M.IP.



Penguji Utama : Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 10 Agustus 2022

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan tinggi manapun.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 05 Agustus 2022
Yang Membuat Pernyataan



Riza Firtalia
NPM. 1746021031

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Riza Firtalia dilahirkan di Sidodadi Lampung Tengah pada tanggal 24 Juni 2000, penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Rosidin dan Ibu Susiani. Jenjang pendidikan penulis dimulai dari TK Al-Baish Desa Tanjung Kari Kecamatan Pulau Beringin, penulis melanjutkan pendidikan di SD N 1 Tanjung Kari Kecamatan Pulau Beringin.

Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama di SMP N 1 Pulau Beringin. Selanjutnya, penulis mengenyam pendidikan ke Sekolah Menengah Atas di SMA N 1 Pulau Beringin yaitu lulus pada tahun 2017.

Pendidikan dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi melalui jalur mandiri pada tahun 2017, dan diterima sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Lampung. Selama berkuliah di Universitas Lampung pada tahun 2020 di bulan januari, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Batu Bedil Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Pringsewu selama 40 hari. Penulis juga melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di DPRD Kota Bandar Lampung pada tahun 2020 selama 40 hari.

MOTTO

“Seseorang yang berani membuang satu jam waktunya tidak mengetahui nilai dari kehidupan”

(Charles Darwin)

“Gadis yang pikirannya sudah dicerdaskan, pemandangannya sudah diperluas, tidak akan sanggup lagi hidup di dalam dunia nenek moyangnya”

(R.A Kartini)

Persembahan

Ku Persembahkan Karya Ini

Kepada

Kedua orang tuaku tercinta Bapak Rosidin dan Ibu Susiani atas segala pengorbanan yang disertai do'a yang tulus dan tiada henti untuk segala urusan dan keberhasilanku. Terimakasih yang tak terhingga untuk segala cinta dan kasih sayang yang telah diberikan kepadaku.

Untuk adikku Risma Dinda Safitri dan seluruh keluarga besarku, sahabat dan teman-teman yang selalu ada untuk mendukungku.

Para Pendidik Tanpa Tanda Jasa Yang Ku Hormati

Almamater tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul “Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tulung Agung Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai akibat dari keterbatasan yang ada pada diri penulis.

Pada kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain, yakni:

1. Allah SWT, Sang Maha Segalanya yang senantiasa melindungi dan memberkahi penulis dengan kasih sayang dan keimanan atas kehadirat-Nya.
2. Kedua orang tua, ayahanda Rosidin dan ibunda Susiani yang telah mengorbankan segalanya, mengasuh dengan tulus dan ikhlas, selalu mendoakan di segala kesempatan, serta memberikan dukungan yang berlimpah. Untuk saudariku Risma Dinda Safitri yang sudah memberi semangat kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai. Serta seluruh keluarga besar yang turut memberikan dukungan tiada henti.
3. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Darmawan Purba, S.IP., M.IP selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung sekaligus dosen pembantu penulis yang senantiasa mendukung dan memberikan motivasi dalam menjalani perkuliahan.

6. Bapak Drs. Hi. Aman Toto D, M.H. selaku pembimbing utama penulis yang telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan ilmu memotivasi penulis hingga skripsi ini selesai menjadi lebih baik.
7. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si. selaku pembahas, penguji yang telah memberikan kritik saran dan masukan sehingga dapat membangun skripsi ini menjadi lebih baik.
8. Seluruh dosen dan staff Ilmu Pemerintahan FISIP Unila yang telah memberikan ilmu dan perhatiannya kepada penulis khususnya dan mahasiswa lain pada umumnya.
9. Ayu Sunyari, Martilina, dan Diah Pranita Manulang sahabat dari awal masuk kuliah yang telah selalu ada untuk menemani penulis dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai.
10. Rifki Ramadhan, orang terdekat yang selalu ada membantu dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai, menemani penulis baik dalam suka maupun duka, memberikan semangat yang tiada henti dan kepedulian kepada penulis ketika mengerjakan skripsi ini.
11. Leza Armanda, Siska Rumawan, Intan Permata Putri sahabat dari SMA yang telah menemani penulis dan memberikan support hingga saat ini.
12. Teman-teman Jurusan Ilmu Pemerintahan 2017 Diah, Ayu, Martilina, Devi, Nisi, Setiawan, Deni, Yusuf, M Ichsan, Ichsan, Evando, Clara, Ridho, dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih telah menjadi bagian dari teman penulis baik dari sejak awal perkuliahan maupun sejak semester akhir pada masa-masa skripsi.
13. Serta nama-nama yang mungkin terlewat dari ingatan, terima kasih atas doa yang telah terucap maupun tidak terucap, semoga doa dan harapan kita tercapai. Amin

Semoga Allah SWT membalas amal baik kita semua dan semoga karya ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Bandar Lampung, 05 Agustus 2022

Riza Firtalia

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Peran	13
2.1.1 Pengertian Peran	13
2.1.2 Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran	17
2.1.3 Hal-hal penting yang terkait dengan peran.....	18
2.1.4 Ciri-ciri peran	18
2.2 Konsep Desa	18
2.2.1 Pengertian Desa	18
2.3 Konsep Kepala Desa	20
2.3.1 Pengertian Kepala Desa	20
2.3.2 Tugas Kepala Desa	23
2.4 Konsep Motivasi	24
2.4.1 Pengertian Motivasi	24
2.4.2 Fungsi Motivasi	27
2.4.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi.....	27
2.4.4 Macam-macam Motivasi	29
2.4.5 Metode peningkatan motivasi	30
2.4.6 Penilaian Motivasi	31
2.5 Pemberdayaan Masyarakat	32
2.6 Kerangka Pikir	32

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian	37
3.2 Lokasi Penelitian	37
3.3 Fokus Penelitian	38
3.4 Informan Penelitian	40
3.5 Jenis Data	41
3.6 Teknik Pengumpulan Data	41
3.7 Pengolahan data	43
3.8 Teknik Analisis Data	44
3.9 Teknik Keabsahan Data	47

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1 Kondisi Desa	47
4.1.1 Sejarah Berdirinya Desa Tulung Agung	47
4.1.2 Demografi	48
4.1.3 Visi dan Misi Desa Tulung Agung	49
4.1.4 Keadaan Sosial	51
4.1.5 Keadaan Ekonomi	50
4.2 Kondisi Pemerintahan Desa	54
4.2.1 Lembaga Pemerintahan	54
4.2.2 Lembaga Kemasyarakatan	55
4.2.3 Pembagian Wilayah	55
4.2.4 Struktur Organisasi Desa Tulung Agung	56
4.2.5 Nama-nama Anggota Dewan Himpunan Pedesaan	56
4.2.6 Prasarana dan Sarana Desa	57
4.2.7 Pemerintahan Umum	58

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan	60
---	----

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan	76
6.2 Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel Potensi Ekonomi di Kabupaten Pringsewu	8
2. Tabel Data Informan	40
3. Tabel Prasarana Dan Sarana Desa Tulung Agung	57
4. Tabel Pemerintahan Umum Desa.....	58

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Gambar Kerangka Pemikiran	36
2. Gambar Kegiatan Menganyam Bambu	64
3. Gambar Penyediaan Bibit Padi	66
4. Gambar Hasil Anyaman Bambu	71

LAMPIRAN

1. Dokumentasi
2. Transkrip Wawancara
3. Surat Riset

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam rangka menciptakan *good governance* disuatu daerah hendaknya mampu mendekatkan antara unsur pemerintah, unsur swasta maupun masyarakat. Pemerintah hendaknya menyerahkan sebagian dari kekuasaannya kepada swasta dan masyarakat, sehingga keduanya dapat mengambil porsi yang tepat dalam proses pembangunan. Proses pembangunan memang membawa konsekuensi-konsekuensi tertentu bagi sektor pedesaan. Konsekuensi demikian ini dapat dipandang sebagai problem sekaligus tantangan pembangunan pedesaan terlebih sekarang ini untuk memasuki pasar bebas (Muhammad Alfiat, 2018).

Tantangan-tantangan itu pasti akan selalu berubah, baik dilihat dari segi intensitasnya maupun dimensi masalahnya yang kesemuanya perlu dicarikan jalan keluarnya. Bagaimanapun juga usaha pemerintah akan sia-sia dalam pelaksanaan pencapaian tujuan, tanpa kesadaran masyarakat untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam usaha peningkatan sosial ekonomi masyarakat tersebut karena hal itu merupakan hal yang paling penting (Muhammad Alfiat, 2018).

Pada umumnya pembangunan nasional banyak negara-negara baru berkembang ditekankan pada pembangunan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh karena yang paling terasa adalah keterbelakangan ekonomi, dan pembangunan di bidang ini dapat mendukung pencapaian tujuan, atau mendorong perubahan-perubahan dan pembaharuan dalam bidang kehidupan lain daripada masyarakat. Tetapi perhatian terhadap pembangunan ekonomi saja sudah diakui tidak memberikan jaminan untuk suatu proses pembangunan nasional yang stabil dan kontinu, apabila diabaikan berbagai segi dibidang sosial. Kecuali itu kemajuan-kemajuan kesejahteraan ekonomi, apalagi dibarengi dengan adanya ketidakadilan ekonomi, tidak selalu mencerminkan kemajuan dan kualitas hidup suatu masyarakat. Dewasa ini diperkembangkan suatu pendekatan yang *unified* (integral). (Bintoro Tjokroamidjojo, 1996:44)

Optimalisasi pembangunan sangat dipengaruhi oleh bagaimana fungsi yang dijalankan oleh pihak pemerintah sebagai koordinator pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini pemerintah harus mampu mengkoordinasikan berbagai unit dalam pemerintahan agar dapat mendayagunakan fungsi mereka dengan baik dan memberikan kontribusi yang nyata bagi proses pembangunan (Septiana Nur Utami, 2011).

Program pembangunan yang dilakukan pemerintah desa tidak lepas dari peranan oleh seorang kepala desa. Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan kepala desa/desa adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala pemerintahan desa/desa adat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pemerintah desa dalam upayanya mengembangkan ekonomi lokal juga dapat terlihat dari pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berada di desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Pasal 1 ayat (6) "Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Keberhasilan pembangunan desa akan sangat ditentukan oleh sosok kepala desa. Selain mengkoordinasikan pembangunan desa, kepala desa juga harus mampu menggerakkan sumber daya manusia dengan cara memberikan dorongan kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan berhasil mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga tindak lanjut.

Masyarakat bukan lagi menjadi obyek pembangunan tetapi menjadi pelaku pembangunan dengan peran kepala desa sebagai motivator pembangunan. Keikutsertaan masyarakat secara terpadu akan mendorong masyarakat untuk lebih aktif karena masyarakat merasa ikut memiliki hasil-hasil pembangunan. Hal ini akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan fisik di desa.

Kegiatan komunikasi yang dilakukan kepala desa dalam menjalankan peranannya sebagai motivator pembangunan serta peran aktif masyarakat sangat menentukan keberhasilan pembangunan fisik di desa. Maka dari itu referensi dari penelitian ini, penulis mencantumkan 3 penelitian terdahulu tentang peran kepala desa sebagai motivator pembangunan desa. Penelitian mengenai peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat desa telah banyak dilakukan oleh penelitian terdahulu, penulis mencoba menelaah penelitian terdahulu guna membandingkan dengan penelitian yang penulis buat dan tentunya sebagai bahan rujukan penulis. Berikut paparan singkat mengenai penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Peneliti Septiana Nur Utami (2011) menilai bahwa keberhasilan pembangunan sebuah desa akan sangat ditentukan oleh sosok kepala desa sebagai figur pemimpin pemerintahan desa. Seorang kepala desa harus dapat menggerakkan sumber daya manusia untuk dapat mencapai keberhasilan proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu, paradigma pembangunan baru bukan lagi menjadikan masyarakat sebagai obyek pembangunan melainkan menjadi pelaku pembangunan dengan peran kepala desa sebagai motivator dalam menggerakkan partisipasi masyarakat

yang diwujudkan dalam bentuk swadaya. Kegiatan komunikasi yang dilakukan kepala desa dalam menjalankan peranannya sebagai motivator pembangunan serta peran aktif masyarakat sangat menentukan keberhasilan pembangunan fisik di desa.

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan peranan kepala desa sebagai motivator dalam menggerakkan swadaya masyarakat dalam rangka pembangunan fisik di Desa Ngancar, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri melalui pendekatan kualitatif. Penulis menggunakan metode penarikan sampel *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses analisis data meliputi reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan serta verifikasinya.

Peneliti selanjutnya yaitu Anggi Setiawan (2013) menilai bahwa peran kepala desa menjadi penting yang sangat diperlukan dalam proses pembangunan desa guna untuk memperlancar pembangunan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa. Penelitian ini menyoroiti tentang peran kepala desa terhadap swadaya masyarakat dalam pembangunan di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur.

Temuan menunjukkan bahwa kepala desa sangat berperan dalam memberikan motivasi, fasilitas dan menggerakkan warga disetiap kegiatan-kegiatan pembangunan desa. Dalam perannya temuan juga menunjukkan bahwa peran kepala desa yang paling sering terlihat yaitu kepala desa sebagai fasilitator hal ini terlihat bahwa kepala desa sering memfasilitasi setiap kegiatan-kegiatan pembangunan desa di desa penelitian yaitu di Desa Bumi Rapak.

Faktor pendukung dan penghambat peran kepala desa dalam menggalang swadaya masyarakat juga di bahas dalam penelitian ini. Dalam perannya untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur, temuan juga menunjukkan kepala desa dalam meningkatkan swadaya masyarakat sangat penting dalam mengadakan pendekatan dan menumbuhkan serta mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat untuk dapat merealisasikan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).

Peneliti lainnya Rini Ulfatul Hasanah (2020) mengatakan bahwa motivasi adalah keinginan dalam diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut bertindak. Biasanya orang bertindak karena suatu alasan untuk mencapai tujuan. Memahami motivasi sangatlah penting karena kinerja, reaksi terhadap kompensasi dan persoalan sumber daya manusia yang lain dipengaruhi dan mempengaruhi motivasi.

Pendekatan untuk memahami motivasi berbeda-beda, karena teori yang berbeda mengembangkan pandangan dan model mereka sendiri. Motivasi dalam penggerak swadaya masyarakat dalam pembangunan desa sudah cukup terlaksana dengan baik terlihat dari berbagai kegiatan komunikasi yang dilakukan dan hasil-hasil pembangunan fisik yang terlaksana dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat, proses dan strategi motivasi Kepala Desa Sukamakmur berhasil menggerakkan partisipasi masyarakat dalam bentuk swadaya yaitu swadaya ide, dana, tenaga, dan material pembangunan.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, maka perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu pada objek penelitian yang diambil. Penelitian pertama objek penelitiannya adalah peranan kepala desa sebagai motivator dalam menggerakkan swadaya masyarakat dalam rangka pembangunan fisik desa, dan merupakan penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam (*indepth interview*), penelitian ini menggunakan metode deskriptif.

Penelitian kedua objek penelitiannya adalah peran kepala desa terhadap swadaya masyarakat dalam pembangunan, dengan metode penelitian yaitu prosedur, cara-cara dan langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ilmiah dengan menghimpun atau mengumpulkan data-data untuk dapat diperiksa dan diuji kebenarannya, penelitian ini tergolong penelitian kualitatif.

Penelitian ketiga objek penelitiannya yaitu peran kepala desa sebagai motivator pembangunan Di Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Ketiga penelitian diatas melihat peran kepala desa sebagai motivator pembangunan di desa. Sedangkan, pada penelitian ini membahas mengenai Peran Kepala Desa Sebagai Motivator Dalam Meningkatkan Kreatifitas Pemberdayaan Ekonomi Di Desa Rejosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.

Indikator peran kepala desa sebagai pendorong yaitu mencakup peran kepala desa dalam memotivasi aparat, menyediakan sarana dan prasarana sehingga dapat memotivasi aparat dalam melaksanakan kegiatan. Sedangkan peran sebagai pengarah adalah pemberian petunjuk yang bijaksana terhadap pelaksanaan pekerjaan. Demikian pula dengan peran sebagai pembimbing dapat menyalurkan ilmu pengetahuan yang dimiliki sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pembangunan desa (Sutopo, 2006 :113).

Untuk mencapai peran kepala desa sesuai yang diharapkan diperlukan kemampuan yang sesuai dengan karakteristik pembangunan di wilayah desa. Setiap kebijakan pembangunan disesuaikan dengan kondisi dan keberadaan masyarakat dalam suatu wilayah. Moeljarto Tjokrowinoto (dalam, Dawali, 2006:1) mengemukakan bahwa pembangunan merupakan serangkaian upaya pemerintah untuk memajukan masyarakat sesuai kondisi kawasan dengan konsep tertentu.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus mengembangkan potensi yang ada di kawasan perdesaan salah satunya yaitu mengembangkan desa wisata. Melalui desa wisata guna membantu memulihkan perekonomian masyarakat desa. Pengembangan adanya desa wisata tersebut dilakukan dengan memberi bimbingan kepada masyarakat desa untuk mengelola potensi yang ada di desanya, sebab melalui terbentuknya desa wisata dapat secara langsung memberi dampak perekonomian kepada masyarakat desa. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ibu Pertiwi menyimpan segudang keindahan yang mulai terkenal maupun yang belum sama sekali terjamah tangan manusia. Mulai dari pantai, pulau, gunung, bukit, lembah, sungai, air terjun, hutan bahkan keindahan alam lain yang mulai dipadukandengan keindahan arsitektur didalamnya yang dapat menarik lebih banyak pengunjung.

Pringsewu merupakan daerah hasil pemekaran dari Kab. Tanggamus. Berdasarkan keputusan pemerintah, Pringsewu dijadikan sebagai kabupaten tersendiri karena memiliki grafik perkembangan yang bagus. Pringsewu dinilai memiliki perkembangan yang meningkat dari sisi pendapatan daerah, taraf ekonomi dan pendidikan. Kabupaten Pringsewu terdiri dari 8 (delapan) wilayah kecamatan antara lain Kecamatan Pardasuka, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Gading Rejo, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Banyumas, dan Kecamatan Adiluwih. Berdasarkan sisi pendapatan daerah sendiri ternyata didukung juga dengan banyaknya destinasi wisata yang bermunculan di Pringsewu sehingga banyak sekali traveler yang datang sekedar untuk berlibur. Berikut ini adalah potensi ekonomi yang ada di pringsewu. Berikut potensi pendukung ekonomi yang ada di Kabupaten Pringsewu

Tabel 1. Potensi Ekonomi di Kabupaten Pringsewu

No	Potensi	Hasil
1.	Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan	Sentra padi organik, dan tanaman palawija lainnya, budidaya air tawar, dan usaha peternakan sapi potong.
2.	Pertambangan	Mangan, bentonit, marmer, biji besi, silika, biorit, dan andesit. Termasuk potensi sumber air mineral di Kecamatan Ambarawa yakni air barawang.
3.	Industri	Sentra industri kain tapis, manik-manik, kain perca, dan kerajinan anyaman bambu. industri batu bata dan genteng.
4.	Pariwisata	Telaga gupid, bukit PJR, bukit BLT, sampan mataram, pura giri sutra mandala, rest area, agro wisata taman buah, bukit pangonan, goa maria padang bulan, makam KH Ghalib, rumah pohon podorejo, embung fajar agung, dan lain sebagainya.

Sumber: Diolah oleh peneliti (2022)

Setiap daerah memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk melangsungkan kehidupannya. Berdasarkan perbedaan wilayah akan menyebabkan potensi daerah yang berbeda pula. Potensi daerah yang berbeda maka akan menunjukkan aktivitas manusia yang berbeda pula, karena pada dasarnya manusia akan selalu memanfaatkan potensi daerah yang ia tempati. Hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan aktivitas manusia di permukaan bumi dalam memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) untuk usaha pertanian, mengolah hasil pertanian maupun industri.

Sebagaimana halnya Sumber Daya Alam (SDA) yang terdapat di Desa Tulung Agung Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu yaitu bambu yang biasa disebut "*pring*" oleh masyarakat suku Jawa merupakan Sumber Daya Alam (SDA) yang banyak tersedia sehingga sebagian besar petani di Desa Tulung Agung banyak memanfaatkannya untuk usaha industri.

Desa Tulung Agung kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu didirikan pada tahun 1918 oleh Bapak Sopawiro. Bapak Sopawiro adalah seorang yang datang dari Jawa tepatnya dari Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Dengan luas wilayah sebesar 431,25 Ha dan jumlah KK 1.695. yang terdiri dari enam dusun yaitu Dusun Tulung Agung 1, Dusun Tulung Agung II, Dusun Tulung Rejo I, Dusun Tulung Rejo III. Berdasarkan dari hasil pra-survei bahwa kegiatan menganyam bambu di Desa Tulung Agung ini telah ada sejak tahun 1984 dimana pada saat itu produk anyaman yang dihasilkan hanya beberapa jenis saja, diantaranya ialah tampah, irek, topi petani, keranjang kopi, dan kurungan ayam.

Dalam pengembangannya pemerintah setempat pernah memberikan pembinaan pada tahun 1998 dengan mendatangkan beberapa ahli keterampilan untuk melakukan pelatihan, terutama dalam bidang produksi hingga distribusi. Dari hasil pelatihan tersebut masyarakat Desa Tulung Agung berhasil berinovasi dan mengembangkannya secara berlanjut, dari yang tadinya hanya topi petani, tampah, irek, namun saat ini para pengrajin berhasil memproduksi jenis anyaman bambu yang berbeda dari sebelumnya. Diantaranya cangkir, teko, patung, vas bunga, tas, dsb. Dengan kualitas dan harga yang berbeda-beda.

Tidak hanya itu Desa Tulung Agung pernah mendapatkan prestasi desa kreatif se-provinsi Lampung di tahun 2002 dan hingga saat ini Desa Tulung Agung menyandang dengan sebutan desa kreatif, Keberhasilan dari usaha tersebut menjadikan para pengrajin sebagai sumber pemasukan utama terutama ibu-ibu rumah tangga. Hal ini tentunya akan membantu mengurangi beban suami dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut (Mudrajat dalam Susanti, Hanafi, Adiono 2013). Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (kememparekraf), ekonomi kreatif didefinisikan sebagai penciptaan nilai tambah yang berbasis ide yang lahir dari kreatifitas sumber daya manusia (orang kreatif) dan berbasis ilmu pengetahuan, termasuk warisan budaya dan teknologi, yang mana pada dasarnya di dalam ekonomi kreatif terdapat industri kreatif sebagai proses produksi karya kreatif oleh masyarakat setempat.

Peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Tulung Agung Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu, karena berdasarkan apa yang dilihat di Desa Tulung Agung tingkat kreativitas dan daya saing masyarakat desa Tulung Agung dalam mengelola ekonominya masih sangat rendah, karna jika di lihat dari program program pemberdayaan msayarakat yang ada di Desa Tulung Agung telah terarah dan dan berjalan dengan baik, karena Berdasarkan masalah yang ada Desa Tulung Agung dapat dilihat dari dua pendekatan yaitu kemiskinan struktural, dan sumber daya manusia yang rendah. adapun persoalan lain yaitu persoalan pendidikan yang lebih dipicu oleh rendahnya perekonomian masyarakat dan kesadaran akan pendidikan dari masyarakat. Upaya untuk menanggulangnya menggunakan peran kepala desa sebagai motivator, fasilitator dan mobilisator. Di samping itu Desa Tulung Agung memiliki potensi dominan yang dapat dijadikan sebagai fakkor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan.

Adapun permasalahan yang memerlukan pemecahan bersama Kepala Desa Tulung Agung adalah bagaimana upaya kepala desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Tulung Agung Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Di Desa Tulung Agung Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni Bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tulung Agung Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu ingin mengetahui Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tulung Agung Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengelolaan pemerintahan desa khususnya kajian ilmu pemerintahan. Dapat mempraktikkan kebijakan dan sebagai bahan pertimbangan pada penelitian lain dimasa mendatang, terutama untuk mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

2. Secara Praktis

Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dan tambahan wawasan lingkungan sosial masyarakat di Desa Tulung Agung. dan bagi kepala desa agar bisa lebih meningkatkan kualitas kerjanya untuk memperbaiki taraf hidup masyarakatnya dalam bidang apapun dan diharapkan lebih bisa memfasilitasi masyarakatnya dalam segala kegiatan yang ada di Desa Tulung Agung dan sebagai rujukan penelitian selanjutnya tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Peran

2.1.1 Pengertian Peran

Menurut Nye, 1976 dalam (Andarmoyo, 2012) Peran menunjuk kepada beberapa set perilaku yang kurang lebih bersifat homogen, yang didefinisikan dan diharapkan secara *normative* dari seseorang dalam situasi sosial tertentu. Peran didasarkan pada preskripsi dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran tersebut (Andarmoyo, 2012).

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil (Fadli dalam Kozier Barbara, 2008).

Peran adalah ketika seseorang memasuki lingkungan masyarakat, baik dalam skala kecil (keluarga) maupun skala besar (masyarakat luas), setiap orang dituntut untuk belajar mengisi peran tertentu. Peran sosial yang perlu dipelajari meliputi dua aspek, yaitu belajar untuk melaksanakan kewajiban dan menuntut hak dari suatu peran, dan memiliki sikap, perasaan, dan harapan-harapan yang sesuai dengan peran tersebut (Momon Sudarman, 2008).

Berdasarkan teori peran yang dikemukakan oleh Suharto (2006:32), yaitu:

1. Peran sebagai suatu kebijakan, yaitu kebijakan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan.
2. Peran sebagai strategi, yaitu strategi yang digunakan oleh kepala desa untuk pelaksanaan pembangunan desa dan mendapatkan dukungan/partisipasi dari masyarakat.
3. Peran sebagai alat komunikasi, yaitu digunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan pelaksanaan pembangunan.

Untuk mengetahui sejauh mana peran atau peranan yang dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi atau jabatan tertentu, dapat dilihat dari perilaku dan tindakan yang dilakukan selama memegang kedudukan atau posisi tersebut. Menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2015: 216-217), indikator tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran, yaitu:

- a) *Expectation* (harapan). Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, yang seyogianya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu.
- b) *Norm* (norma). Norma, merupakan salah satu bentuk harapan. Jenis harapan menurut Secord & Backman adalah sebagai berikut: (a) Harapan yang bersifat meramalkan (*anticipatory*) yaitu harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi, (b) Harapan normatif (*prescribed role expectation*) adalah keharusan yang menyertai suatu peran. Harapan normatif dibagi ke dalam dua jenis yaitu: pertama, harapan yang terselubung (*covert*) adalah harapan yang ada tanpa harus diucapkan. Misalnya dokter harus menyembuhkan pasiennya, guru harus mendidik murid-muridnya. Inilah yang disebut norma (*norm*). Kedua, yaitu harapan yang terbuka (*overt*) adalah harapan yang diucapkan.

- c) *Performance* (wujud perilaku). Wujud perilaku dalam peran. Peran diwujudkan dalam perilaku nyata, bukan sekedar harapan. menjadi positif. Penilaian maupun sanksi menurut Biddle dan Thomas dapat datang dari orang lain maupun dari dalam diri sendiri (Sarwono, 2015: 217-220).
- d) *Evaluation* (penilaian) dan *sanction* (sanksi). Penilaian peran adalah pemberian kesan positif atau negatif yang didasarkan pada harapan masyarakat terhadap peran dimaksud. Sedangkan sanksi adalah usaha orang untuk mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga yang tadinya dinilai negatif

Kepala Desa mempunyai peran untuk mengurus secara mandiri kepentingan masyarakat desanya sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. Pembangunan masyarakat desa merupakan hal yang mencakup pengelolaan pemerintahan desa secara keseluruhan dimana Kepala Desa ikut berperan di dalamnya. Adapun peran Kepala Desa menurut Bintoro Tjokroamidjojo (2000:42) yaitu sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator.

1. Motivator

Yaitu fungsi pemerintah desa sebagai pendorong, rangsangan, pengaruh dan pemberi semangat atau menumbuhkan motivasi kepada masyarakat setempat atau memberikan semangat kepada individu kepada individu lainnya sedemikian rupa, agar ikut melakukan tindakan-tindakan atau agar ikut melaksanakan sesuatu yang positif sehingga apa yang diharapkan dapat lebih berkembang dan suatu saat dapat menjadi penopang perekonomian yang ada.

Hal tersebut dapat diwujudkan dengan adanya pelatihan-pelatihan atau lazim disebut Satuan Kerja Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku masyarakat dan aparatur penyelenggara pemerintah desa/kelurahan, sehingga mampu memberdayakan serta membangun diri dan lingkungan secara mandiri.

Seorang Kepala Desa sebagai motivator yaitu kepala desa akan memotivasi warga desanya agar berperan aktif dalam pembangunan desa ataupun hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan desa.

2. Fasilitator

Dalam hal ini Kepala Desa sebagai fasilitator yaitu orang yang memberikan bantuan dan menjadi nara sumber yang baik untuk berbagai permasalahan serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan pembangunan desa, memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembangunan sehingga program pembangunan desa dapat berjalan dengan baik.

3. Mobilisator

Yaitu orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama. Jadi kepala desa sebagai mobilisator yaitu Kepala Desa menggerakkan atau mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa yang berguna untuk kepentingan bersama, misalnya melakukan gotong royong, memperbaiki tempat ibadah, serta memperbaiki tempat-tempat umum lainnya.

Teori Bintoro Tjokroamidjojo (2000:42) tersebut melihat peran atau peranan seseorang dari harapan-harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, norma, wujud perilaku, pemberian kesan positif atau negatif yang didasarkan pada harapan terhadap peran dimaksud. Dengan demikian Bintoro Tjokroamidjojo (2000:42) lebih komprehensif dalam melihat peran seseorang dalam suatu posisi tertentu.

2.1.2 Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peran

Menurut Nursalam dan Pariani (2001) dalam Hernawati (2015) Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menyesuaikan diri dengan peran yang harus dilakukan adalah:

1. Kejelasan perilaku dan pengetahuan yang sesuai dengan peran. Kejelasan terhadap perilaku dan pengetahuan yang didapat tentang apa yang seharusnya dilakukan (peran). Maka jika pengetahuan / perilaku sudah pasti, seseorang dapat menjalankan peran dengan maksimal.
2. Konsistensi respon orang yang berarti terhadap peran yang dilakukan. Dalam menjalankan peran yang diterima selalu berhubungan dengan orang lain. Keteraturan respon tersebut dapat memberikan semangat dalam menjalankan peran yang dijalankannya.
3. Kesesuaian dan keseimbangan antar peran yang dijalankannya. Adanya keseimbangan perjalanan peran satu dengan peran yang lainnya menjadikan kesesuaian terhadap pencapaian tujuan tertentu, sehingga peran satu dengan yang lainnya harus berkesinambungan.
4. Keselarasan budaya dan harapan individu terhadap perilaku peran. Budaya merupakan kebiasaan dan harapan terhadap perilaku tersebut menjadikan kesungguhan dalam menjalankannya.

5. Pemisahan situasi yang akan menciptakan ketidaksesuaian perilaku peran. Keadaan tiap individu sebenarnya memiliki tugas / peran masing-masing dimanabertentangan dengan peran yang dijalannya, sehingga dalam menjalankan perannya tidak normal.

2.1.3 Hal-hal Penting Yang Terkait Dengan Peran

Menurut Sunaryo (2004), hal-hal penting yang terkait dengan peran adalah:

1. Peran dibutuhkan individu sebagai aktualisasi diri
2. Peran yang memenuhi kebutuhan dan sesuai dengan ideal diri menghasilkan harga diri tinggi dan sebaliknya
3. Posisi individu di masyarakat dapat menjadi stressor terhadap peran.

2.1.4 Ciri-ciri Peran

Anderson Carter dalam Andarmoyo (2012) menyebutkan ciri-ciri peran antara lain :

- a. Terorganisasi, yaitu adanya interaksi
- b. Terdapat keterbatasan dalam menjalankan tugas dan fungsi
- c. Terdapat perbedaan dan kekhususan

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap seseorang yang di dalamnya terdapat status atau kedudukan yang dimiliki baik dalam masyarakat maupun dalam lingkungan kerja, sehingga peran selalu berhubungan dengan harapan-harapan baik individu ataupun kelompok.

2.2 Konsep Desa

2.2.1 Pengertian Desa

Pengertian Desa menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 menyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2017:1), desa ialah gambaran dari suatu kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia serta menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia.

Sedangkan menurut R. Bintarto dalam buku Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa (2015:6) menyebutkan bahwa Desa merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi politik, serta *cultural* setempat dalam hubungan dan pengaruh timbale balik dengan daerah lain.

Menurut Sutarjo Kartohadikusumo dalam buku Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa (2015:6) , Desa ialah kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri yaitu pemerintahan di bawah camat.

Definisi desa menurut Paul H Landis dalam buku Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa (2015:6) menyatakan bahwa Desa ialah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri sebagai berikut : a. Mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal diantara ribuan jiwa b. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan c. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.

Berdasarkan pendapat para ahli dan Undang-Undang di atas dapat disimpulkan bahwa Desa merupakan unit terkecil dari suatu pemerintahan di Indonesia yang dipimpin oleh seorang kepala desa yang memiliki penduduk hanya dalam jumlah ribuan jiwa.

2.3 Konsep Kepala Desa

2.3.1 Pengertian Kepala Desa

Kepala Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Menurut Suriakusumah dan Prayoga Bestari (2009, hlm. 260) mengatakan, “Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa. Tugas Kepala Desa mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan Pemerintah Desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, urusan pemerintah umum, pembinaan dan pembangunan masyarakat serta menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah atasnya.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, Kepala Desa bersamasama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibantu oleh perangkat desa. Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai tujuan pembangunan desa, maka diperlukan kemampuan, kecerdasan, keterampilan disamping persyaratan lain secara administratif.

Persyaratan sebagai calon Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia, hal ini sesuai dengan undang – undang No. 32 Tahun 2004 pasal 203 yang berbunyi :

1. Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 202 ayat (1) dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Peraturan Daerah yang berpedoman kepada peraturan pemerintah.
2. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai kepala desa.
3. Pemilihan kepala desa dalam kesatuan Masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan penjelasan di atas, sangatlah jelas bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi calon kepala desa sangat selektif. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan seseorang sebagai kepala desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjalankan roda Pemerintah Desa sebagai upaya pencapaian pembangunan desa yaitu meningkatkan kemakmuran dan kemajuan masyarakatnya.

Selanjutnya kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Menurut Ade Engkus Kusnadi (2007, hlm. 44) mengatakan, “kepala desa juga memiliki wewenang menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. Kepala desa dipilih langsung melalui pemilihan kepala desa (PILKADES) oleh penduduk desa setempat”.

Dalam pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa : Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa sebagai dimaksud (pasal 202 ayat 1) dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilih diatur dengan perda yang berpedoman kepada peraturan pemerintah.

Sebagai seorang kepala desa, sekaligus pemimpin dalam pemerintahan desa maka seorang kepala desa harus mempunyai jiwa pemimpin, mampu dan mau bekerja sama dengan para perangkat desa yang lainnya maupun dengan aparat pemerintah lain di atasnya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Mengingat fungsinya dalam pembangunan yaitu sebagai Motivator, Fasilitator, dan Innovator. pemerintah desa menurut peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa sebagaimana dimaksud terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Perangkat desa terdiri atas sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.

Dari berbagai pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa konsep kepala desa dapat dikatakan sebagai unsur kepala dari organisasi Pemerintah Desa, sekaligus juga merupakan seorang pemimpin yang melaksanakan fungsi kepemimpinan. Sebagai unsur kepala, seorang kepala desa selalu ada dan melekat pada organisasi yang dikepalainya, sedangkan sebagai seorang pemimpin seorang kepala desa melaksanakan fungsi kepemimpinannya.

2.3.2 Tugas Kepala Desa

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selain tugas, kepala desa juga mempunyai kewenangan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- d. Menetapkan Peraturan Desa
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, maka dapat diketahui bahwa kepala desa dalam menjalankan tugas mempunyai banyak kewenangan. Dalam penelitian ini difokuskan pada peran kepala desa dalam memotivasi masyarakat dalam meningkatkan kreatifitas pemberdayaan ekonomi di desa.

Jika dilihat dari tugas dan fungsinya kepala desa mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam menggerakkan, mendorong dan mengawasi program-program pembangunan yang melibatkan masyarakat. Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dituntut kemampuan dan keterbukaan dari kepala desa dalam setiap pembuatan maupun pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kepala desa mempunyai peranan yang sangat vital dalam kehidupan bermasyarakat, karena kepala desa merupakan contoh teladan bagi masyarakat. Kepala desa juga adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

2.4 Konsep Motivasi

2.4.1 Pengertian Motivasi

Motif atau motivasi berasal dari kata Latin *moreve* yang berarti dorongan dalam diri manusia untuk bertindak atau berperilaku (Notoatmodjo,2007). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dikutip dalam Kompri (2016) disebutkan bahwa motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Atau usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu bergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya.

Sedangkan menurut Notoatmodjo (2012), motivasi atau motif adalah suatu dorongan dari dalam diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan. Santrock dalam Kompri (2016) mengungkapkan bahwa motivasi adalah proses yang memberi semangat, arah, dan kegigihan perilaku. Artinya perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang penuh energi, terarah dan bertahan lama.

Lestari (2015) menjelaskan bahwa motivasi merupakan kekuatan, dorongan, kebutuhan, tekanan dan mekanisme psikologis dari akumulasi faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor internal bersumber dari dalam diri individu itu sendiri, sedangkan faktor eksternal bersumber dari luar individu. Faktor internal dan eksternal tersebut berinteraksi dan diaktualisasikan oleh individu dalam bentuk suatu tindakan.

Motivasi adalah semua hal verbal, fisik atau psikologis yang membuat seseorang melakukan sesuatu sebagai respon. Pengertian lain dari motivasi menurut Lestari adalah karakteristik psikologis manusia yang memberikan kontribusi pada tingkat komitmen seseorang. Hal ini termasuk faktor-faktor yang menyebabkan dan mempertahankan tingkah laku manusia dalam arah tekad tertentu.

Mardianto dalam Kompri (2016) juga menjelaskan bahwa tiga kata kunci dari motivasi yang dapat diambil dari pengertian psikologi. Yang pertama adalah dalam motivasi terdapat dorongan yang menjadikan seseorang mengambil tindakan atau tidak mengambil tindakan. Kedua, dalam motivasi terdapat satu pertimbangan apakah harus memprioritaskan tindakan alternatif, baik itu tindakan A atau tindakan B. Ketiga, dalam motivasi terdapat lingkungan yang memberi atau menjadi sumber masukan atau pertimbangan seseorang untuk melakukan tindakan pertama atau kedua.

Sehingga berdasarkan pendapat dari beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan dorongan dari dalam diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan dalam usaha mencapai tujuan yang diinginkan berdasarkan akumulasi dari faktor-faktor internal dan eksternal. Motivasi yang terdapat dalam diri seseorang akan mempengaruhi semangat, arah dan kegigihan perilaku yang

dimilikinya, sehingga perilaku tersebut menjadi penuh energi, terarah dan bertahan lama. Motivasi juga dapat mengarahkan seseorang untuk memprioritaskan tindakan selanjutnya melalui pertimbangan berdasarkan masukan-masukan yang diterima oleh seorang individu.

Peranan pemimpin begitu vital dalam kebijakan publik, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa pemimpin yang mempunyai kepemimpinan yang baik maka kebijakan publik akan menjadi sia-sia (Dwijoyoto, 2003 : 285). Pendapat tersebut menjelaskan bahwa salah satu peranan pemimpin adalah memberikan motivasi kepada bawahannya. pernyataan tersebut sejalan sebagaimana yang dikemukakan oleh Winardi (1989 : 145) bahwa seorang pimpinan yang mementingkan pelaksanaan pekerjaan merupakan pimpinan yang mementingkan motivasi.

Tanggung jawab utama seorang pimpinan dalam memotivasi bawahannya sebagaimana yang dikemukakan oleh nawawi (2005 : 360) adalah merumuskan batasan pelaksanaan pekerjaan bawahannya, menyediakan dan melengkapi fasilitas untuk pelaksanaan pekerjaannya dan memilih atau melaksanakan cara terbaik dalam mendorong / memotivasi pelaksanaan pekerjaan bawahannya.

Konsep motivasi sangat penting karena motivasi merupakan hal yang menyebabkan, menyalurkan dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal. Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya menbgarahkan daya dan potensi bawahan agar mau bekerja sama secara produktif berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan (Hakimi, 2020 : 26)

2.4.2 Fungsi Motivasi

Lestari (2015) mengungkapkan bahwa secara umum tujuan dari motivasi adalah untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau tujuan tertentu. Sedangkan Hamalik dalam Kompri (2016) menjelaskan bahwa motivasi memiliki beberapa fungsi. Fungsi motivasi tersebut diantaranya yaitu untuk mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan, sebagai pengarah untuk mengarahkan perbuatan atau pencapaian tujuan yang diinginkan, serta sebagai penggerak yang diartikan dalam besar kecilnya motivasi yang dimiliki akan menentukan cepat lambatnya suatu pekerjaan.

2.4.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi

Lestari (2015) mengungkapkan bahwa motivasi dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

a. Faktor Fisik/ Ektrinsik

Motivasi di dalam diri individu yang mendorong untuk bertindak dalam rangka memenuhi kebutuhan fisik seperti kebutuhan jasmani, raga, materi, benda, atau berkaitan dengan alam. Faktor fisik merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi lingkungan dan kondisi seseorang, meliputi kondisi fisik lingkungan, keadaan atau kondisi kesehatan, umur, dan sebagainya. Faktor ini juga dapat bersumber dari kondisi sosial, tekanan dan regulasi keorganisasian.

b. Faktor Herediter

Motivasi dapat pula dipengaruhi oleh faktor herediter atau pembawaan dari keturunan individu.

c. Faktor Intrinsik Seseorang

Motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri biasanya timbul dari perilaku yang dapat memenuhi kebutuhan dirinya, sehingga menimbulkan kepuasan dari apa yang sudah dilakukan.

Faktor intrinsik dapat pula disebut sebagai akumulasi aspek-aspek internal individu, seperti kepribadian, intelegensi, ciri-ciri fisik, kebiasaan, kesadaran, minat, bakat, kemauan, spirit, antusiasme, dan sebagainya.

d. Fasilitas (Sarana dan Prasarana)

Motivasi yang timbul karena adanya kenyamanan dan segala yang memudahkan dengan tersedianya sarana-sarana yang dibutuhkan.

e. Situasi dan Kondisi

Motivasi yang timbul berdasarkan keadaan yang terjadi, sehingga mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu.

f. Program dan Aktifitas

Motivasi yang timbul atas dorongan dalam diri seseorang atau pihak lain yang didasari dengan adanya kegiatan (program) rutin dengan tujuan tertentu.

g. Audio Visual (Media)

Motivasi yang timbul dengan adanya informasi yang didapat dari perantara sehingga mendorong hati seseorang untuk melakukan sesuatu.

h. Umur

Semakin cukup umur, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berpikir logis dan bekerja. Sehingga motivasi seseorang dalam melakukan suatu hal lebih kuat.

2.4.4 Macam-macam Motivasi

Notoatmodjo (2012) menjelaskan bahwa motif dapat dibagi berdasarkan berbagai pandangan dari para ahli. Pembagian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Kebutuhan Manusia
 1. Motif kebutuhan biologis, seperti minum, makan, bernapas, seksual, bekerja, dan beristirahat.
 2. Motif darurat, yang mencakup dorongan-dorongan menyelamatkan diri, berusaha, dan dorongan untuk membalas.
 3. Motif objektif, yang meliputi kebutuhan untuk melakukan eksplorasi, melakukan manipulasi dan sebagainya.
- b. Berdasarkan Terbentuknya Motif
 1. Motif-motif pembawaan, yang dibawa sejak lahir, tanpa dipelajari, seperti dorongan untuk makan, minum, beristirahat, dan sebagainya.
 2. Motif yang dipelajari, yaitu motif-motif yang timbul karena dipelajari, seperti dorongan untuk belajar, dorongan untuk mengejar kedudukan, dan sebagainya.
- c. Berdasarkan Penyebab atau Sumbernya
 1. Motif ekstrinsik, yaitu motif yang berfungsi karena adanya rangsangan dari luar. Misalnya, seseorang ibu mau mendatangi penyuluhan gizi, karena menurut kader kesehatan informasi gizi penting dalam rangka perkembangan anaknya.
 2. Motif intrinsik, yaitu motif yang berfungsi tanpa rangsangan dari luar tetapi sudah dengan sendirinya terdorong untuk berbuat sesuatu.

2.4.5 Metode Peningkatan Motivasi

Untuk meningkatkan motivasi seseorang terhadap suatu jenis perilaku dapat dilakukan dengan metode tertentu. Cara atau metode untuk meningkatkan motivasi menurut para ahli dalam model-model motivasi yang dikutip dari Notoatmodjo (2010) adalah sebagai berikut:

- a. Model Tradisional Model ini menekankan bahwa untuk memotivasi masyarakat agar mereka berperilaku sehat, perlu pemberian insentif berupa materi bagi anggota masyarakat yang mempunyai prestasi tinggi dalam berperilaku hidup sehat. Anggota masyarakat yang mempunyai prestasi makin baik dalam berperilaku sehat, maka makin banyak atau makin sering anggota masyarakat tersebut mendapat insentif.
- b. Model Hubungan Manusia Model ini menekankan bahwa untuk meningkatkan motivasi berperilaku sehat, perlu dilakukan pengakuan atau memperhatikan kebutuhan sosial mereka, meyakinkan bahwa setiap orang adalah penting dan berguna bagi masyarakat. Oleh sebab itu, model ini lebih menekankan memberikan kebebasan berpendapat, berkreasi, dan berorganisasi, dan sebagainya.
- c. Model Sumber Daya Manusia Model ini mengatakan bahwa banyak hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan motivasi. Menurut model ini, setiap manusia cenderung untuk mencapai kepuasan dari prestasi yang dicapai, dan prestasi tersebut merupakan tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat. Motivasi akan meningkat jika kepada masyarakat diberikan kepercayaan dan kesempatan untuk membuktikan kemampuannya dalam memelihara kesehatan.

Lestari (2015) juga menjelaskan cara-cara untuk meningkatkan motivasi dapat dilakukan melalui tiga cara. Cara yang pertama adalah memotivasi dengan kekerasan (*motivating by force*), yaitu cara memotivasi dengan ancaman hukuman atau kekerasan dasar yang bertujuan agar individu dapat melakukan apa yang harus dilakukan.

Cara yang kedua adalah memotivasi dengan bujukan (*motivating by enticement*), yaitu cara memotivasi dengan bujukan atau memberi hadiah agar melakukan sesuatu yang diharapkan. Cara yang ketiga adalah memotivasi dengan identifikasi keterlibatan kesadaran diri (*motivating by identification on ego involvement*), yaitu memotivasi dengan menanamkan kesadaran.

2.4.6 Penilaian Motivasi

Penilaian motivasi dapat dilakukan dengan menggunakan kuesioner dengan skala pengukurannya menggunakan skala Likert. Dalam skala ini setiap pernyataan yang dijawab oleh responden akan diberi skor sesuai dengan nilai skala kategori dan selanjutnya dijumlahkan sehingga menunjukkan skor responden. Metode ini juga dinamakan metode rating yang dijumlahkan (*method of summated ratings*) oleh Bird (1940) yang semula dikembangkan oleh Rensis Likert, sehingga dikenal dengan nama metode pengembangan skala model Likert (Azwar, 2012).

Pada skala model Likert dengan menggunakan pernyataan, respon yang diharapkan dari responden adalah taraf kesetujuan atau tidak kesetujuan dalam variasi sangat setuju (SS), setuju (S), tidak tentu (TT), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS). Pernyataan yang terdapat dalam skala pengukuran ini ada yang mengarah pada pernyataan mendukung (*favorable statement*) pada topik yang dipersoalkan serta ada yang mengarah pada tidak mendukung (*unfavorable statement*), dimana jumlah pernyataan mendukung dan tidak mendukung dalam satu perangkat alat ukur tersebut harus seimbang.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan Makna dari penjelasan motivasi dapat ditafsirkan sebagai semangat atau dorongan seseorang untuk melakukan suatu hal atau sebuah hal. motivasi bisa kita pahami segalanya yang bisa menggerakkan atau memajukan seseorang untuk melakukan tindakan dengan maksud spesifik. Motivasi ini bisa datang dari diri sendiri ataupun dari pihak lain. Adanya motivasi seseorang dapat dengan semangat atau gairah dalam melakukan sesuatu, baik perihal yang positif ataupun negatif.

2.5 Pemberdayaan Masyarakat

2.5.1 Definisi Pemberdayaan Masyarakat

Empowerment atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti pemberdayaan merupakan sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat utamaya Eropa. Untuk memahami konsep empowerment secara tepat dan jernih memerlukan upaya pemahaman latar belakang kontekstual yang melahirkannya. Secara konseptual, pemberdayaan atau pemerkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka (Edi Suharto, 2005:57).

Pemberdayaan menurut (Suhendra, 2006:74-75) adalah “suatu kegiatan yang berkesinambungan dinamis secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi”. Selanjutnya pemberdayaan menurut Jim Ife (dari buku Suhendra, 2006:77) adalah “meningkatkan kekuasaan atas mereka yang kurang beruntung (*empowerment aims to increase the power of disadvantage*)”.

Menurut (Moh. Ali Aziz dkk, 2005: 169) pemberdayaan adalah sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus (*breakdown*) dari hubungan antara subjek dan objek. Proses ini mementingkan pengakuan subjek akan kemampuan atau daya yang dimiliki objek. Secara garis besar proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya dari subjek ke objek. Hasil akhir dari pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula objek menjadi subjek (yang baru), sehingga relasi sosial yang nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi sosial antar subyek dengan subyek lain.

Dari beberapa definisi pemberdayaan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu usaha atau upaya yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kemampuan dan kemandirian individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Masyarakat dapat tahu potensi dan permasalahan yang dihadapinya dan mampu menyelesaikannya, (Tantan Hermansyah dkk, 2009:31).

Setelah kita memahami mengenai definisi pemberdayaan, selanjutnya akan dibahas mengenai definisi pemberdayaan masyarakat menurut para ahli. Menurut (Sumaryadi, 2005:11) pemberdayaan masyarakat adalah “upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan”. Selain itu pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadisebagai berikut:

- a. Membantu pengembangan manusiawi yang autentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin perkantoran, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang didiskriminasikan/dikesampingkan.

- b. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

Dari pendapat tersebut maka pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Menurut (Widjaja, 2003:169) pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

(Abu Huraerah, 2008:87) mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut *community self-reliance* atau kemandirian. Dalam proses ini masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif solusi masalah tersebut, serta diperlihatkan strategi memanfaatkan berbagai kemampuan yang dimiliki.

2.6 Kerangka Pikir

Peran adalah suatu sikap seseorang yang di dalamnya terdapat status atau kedudukan yang dimiliki baik dalam masyarakat maupun dalam lingkungan kerja, sehingga peran selalu berhubungan dengan harapan-harapan baik individu ataupun kelompok.

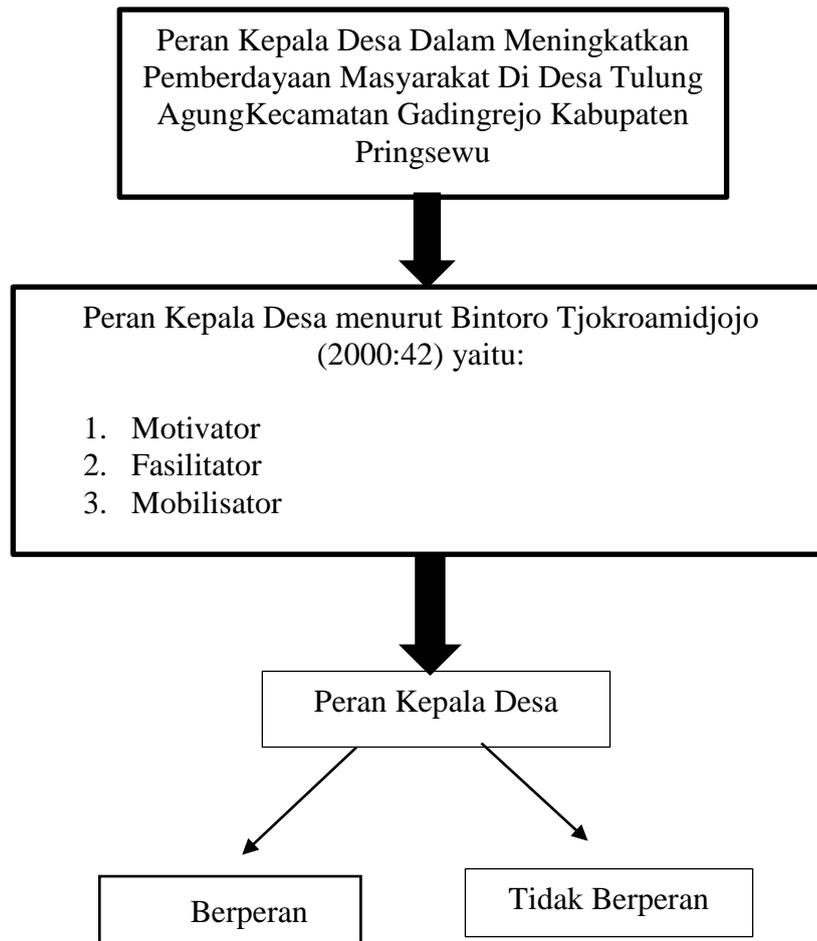
Desa merupakan unit terkecil dari suatu pemerintahan di Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang memiliki penduduk hanya dalam jumlah ribuan jiwa. Kepala Desa mempunyai peranan yang sangat vital dalam kehidupan bermasyarakat, karena Kepala Desa merupakan contoh teladan bagi masyarakat.

Kepala desa juga adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Kemajuan suatu desa tentunya tidak lepas dari dukungan maupun motivasi dari seorang pemimpin desa tersebut. Motivasi dapat ditafsirkan sebagai semangat atau dorongan seseorang untuk melakukan suatu hal atau

sebuah hal. motivasi bisa kita pahami segalanya yang bisa menggerakkan atau memajukan seseorang untuk melakukan tindakan dengan maksud spesifik. Motivasi ini bisa datang dari diri sendiri ataupun dari pihak lain. Adanya motivasi seseorang dapat dengan semangat atau gairah dalam melakukan sesuatu, baik perihal yang positif ataupun negatif.

Motivasi seorang kepala desa kepada masyarakatnya sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk membangun daya masyarakat dalam perekonomian khususnya dengan mendorong, memotivasi, dan menggali potensi yang dimiliki sehingga kondisi akan berubah dari yang tidak berdaya menjadi berdaya dengan perwujudan tindakan yang nyata untuk meningkatkan harkat dan martabat dari sisi ekonomi dan melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat digambarkan kerangka pikir dibawah ini.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Sugiyono (2016: 1) mengatakan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan). Analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian kualitatif adalah yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa atau aktifitas sosial yang berlangsung di masyarakat. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif karena sesuai dengan kebutuhan penelitian dalam melihat dan memaparkan terkait gejala-gejala yang terdapat didalam masalah penelitian yaitu mendeskripsikan dan menganalisa kejadian empiris mengenai bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tulung Agung Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Tulung Agung Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu. Alasan memilih Desa Tulung Agung karena lokasi mudah dijangkau sehingga dapat lebih memudahkan bagi penulis untuk melakukan penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tulung Agung Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, berdasarkan teori peran yang dikemukakan oleh menurut Bintoro Tjokroamidjojo (2000:42) yaitu sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator.

1. Motivator

Yaitu fungsi pemerintah desa sebagai pendorong, rangsangan, pengaruh dan pemberi semangat atau menumbuhkan motivasi kepada masyarakat setempat atau memberikan semangat kepada individu kepada individu lainnya sedemikian rupa, agar ikut melakukan tindakan-tindakan atau agar ikut melaksanakan sesuatu yang positif sehingga apa yang diharapkan dapat lebih berkembang dan suatu saat dapat menjadi penopang perekonomian yang ada.

Hal tersebut dapat diwujudkan dengan adanya pelatihan-pelatihan atau lazim disebut Satuan Kerja Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku masyarakat dan aparatur penyelenggara pemerintah desa/kelurahan, sehingga mampu memberdayakan serta membangun diri dan lingkungan secara mandiri. Seorang Kepala Desa sebagai motivator yaitu kepala desa akan memotivasi warga desanya agar berperan aktif dalam pembangunan desa ataupun hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan desa.

Sebagai kepala pemerintahan desa dalam hal ini sebagai motivator telah bekerja sama dengan masyarakat dalam hal ini yaitu bersama-sama dalam meningkatkan pembangunan desa dengan cara memberikan dorongan kepada warga, disini dapat dilihat bahwa

dorongan dari Kepala Desa selalu dilakukan dengan tujuan bahwa hal tersebut memberikan kesadaran kepada masyarakat desa khususnya masyarakat Desa Tulung Agung akan pentingnya kerja sama dalam sebuah proses pembangunan.

Selain itu, dengan hal tersebut tentunya mendapat respon yang positif dari masyarakat Desa Baliara Selatan karena dorongan dan bimbingan dari Kepala Desa sangat di perlukan dan di nantikan oleh masyarakat desa.

Motivasi merupakan satu penggerak dari dalam hati untuk mencapai suatu tujuan. Dengan kata lain motivasi adalah proses menghasilkan tenaga yang di arahkan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dalam suatu kelompok, motivasi sebagai penggerak kepada kejayaan organisasi. Motivasi memainkan peranan yang sangat penting dalam organisasi termasuk juga dalam organisasi pemerintahan.

2. Fasilitator

Dalam hal ini Kepala Desa sebagai fasilitator yaitu orang yang memberikan bantuan dan menjadi nara sumber yang baik untuk berbagai permasalahan serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan pembangunan desa, memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembangunan sehingga program pembangunan desa dapat berjalan dengan baik.

3. Mobilisator

Yaitu orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama. Jadi kepala desa sebagai mobilisator yaitu Kepala Desa menggerakkan atau mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa yang berguna untuk kepentingan bersama, misalnya melakukan gotong royong, memperbaiki tempat ibadah, serta memperbaiki tempat-tempat umum lainnya.

3.4 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian kualitatif adalah orang yang memberikan informasi terhadap hal-hal yang diteliti. Hal yang terpenting dalam penelitian kualitatif adalah bagaimana menentukan informan kunci ditentukan atas keterlibatan yang bersangkutan terhadap situasi atau kondisi sosial yang ingin dikaji dalam fokus penelitian (Fatchan, 2009:68). Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik secara sengaja (purposive sampling).

Sugiyono (2016:218) mengatakan bahwa purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yang bertujuan untuk memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. Penulis menggunakan teknik purposive sampling dalam penelitian ini merujuk pada tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Peran Kepala Desa Sebagai Motivator Dalam Meningkatkan Kreatifitas Pemberdayaan Ekonomi Di Desa Tulung Aging Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu. Berikut tabel data informan

Tabel 2. Data Informan

No	Nama	Jabatan
1.	Darmawan	Kepala Desa
2.	Rusdian Ali	Sekretaris Desa
3.	Siti Mangati	Pengrajin Anyaman Bambu
4.	Novita Sari	Masyarakat
5.	Supriadi	Petani

3.5 Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung, data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara. Wawancara dilakukan kepada informan yang berhubungan dengan objek penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia atau dipublikasikan untuk umum oleh instansi atau lembaga yang mengumpulkan, mengolah dan menyajikan. Data sekunder merupakan data pelengkap yang diperoleh dengan cara data dari buku-buku, karya-karya, jurnal, internet, literatur, dan dokumentasi terkait objek penelitian. Kedua data tersebut digunakan untuk saling melengkapi data lapangan yang terkadang tidak relevan jika tidak ditunjang dengan kepustakaan. maka data yang terkumpul dapat diuji kebenarannya.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan informasi yang didapat melalui suatu metode untuk dikelola dan dianalisis dengan metode tertentu mengenai hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian sehingga diperoleh data yang benar- benar relevan. Metode yang digunakan adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan metode yang dilakukan dengan pengamatan langsung dalam keadaan yang sebenarnya terhadap suatu objek. Dengan peneliti melakukan observasi, peneliti dapat menyajikan gambaran perilaku atau kejadian sehingga dapat menganalisis data yang tidak sesuai dari data yang diperoleh dari para responden melalui *interview*. Mengingat data yang terkadang diperoleh dari *interview* dipengaruhi oleh orang menyampaikan informasi tersebut. Dengan demikian data yang diperoleh adalah data yang akurat kebenarannya.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam bentuk komunikasi secara verbal seperti percakapan tatap muka langsung antara peneliti dan narasumber yang bertujuan memperoleh informasi dari responden. Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur yaitu penulis telah membuat daftar pertanyaan yang dibuat secara sistematis sehingga penulis telah mengetahui informasi apa yg ingin ditanyakan terhadap responden. Sehingga penulis dapat memahami tentang Peran Kepala Desa Sebagai Motivator Dalam Meningkatkan Kreativitas Pemberdayaan Ekonomi.

Peneliti telah melakukan turun lapangan untuk melaksanakan wawancara sebanyak dua kali pertemuan di Desa Tulung Agung Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu. Wawancara pertama dilaksanakan pada tgl 13 Agustus 2022 kepada bapak sekretaris Desa Tulung Agung Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu, serta dilakukan juga wawancara kepada masyarakat, dan pengrajin anyaman bambu. Wawancara kedua dilaksanakan pada Tgl 14 Agustus 2022 kepada Bapak Kepala Desa Tulung Agung Kecamatan Gsading Rejo Kabupaten Pringsewu.

Berikut deskripsi wawancara turun lapangan beserta informan yang peneliti lakukan :

Hari pertama, pada tanggal 13 Agustus Tahun 2022 peneliti melaksanakan wawancara dengan Bapak Rusdian Ali selaku sekretaris Desa Tulung Agung Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu pada pukul 10:00-11:00 WIB.

Selanjutnya, peneliti meneruskan wawancara dengan pelaku industri rumahan pengrajin anyaman bambu yaitu Ibu Siti Mangati pada pukul 11:30-12:00 WIB. Kemudian peneliti melanjutkan wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Tulung Agung Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu yaitu dengan Ibu Novita Sari pada pukul 13:30-14:15 WIB.

Hari kedua, pada tanggal 14 Agustus Tahun 2022 peneliti mewawancarai Bapak Darmawan selaku Kepala Desa Tulung Agung Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu pada pukul 09:00-10:00 WIB. Kemudian peneliti melanjutkan wawancara dengan salah satu masyarakat yang bekerja sebagai petani yaitu dengan Bapak Supriadi pada pukul 11:00-11:50 WIB.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk menganalisis peraturan-peraturan, buku-buku, dokumen/surat-surat, majalah, notulen rapat, catatan harian. Dalam memperoleh informasi ada tiga jenis sumber yang diperhatikan yaitu: kertas atau orang (*people*), tempat (*place*), dan tulisan (*paper*). Dokumentasi yang peneliti lakukan seperti mengambil foto dari acara penyuluhan kepala desa kepada masyarakat, kegiatan menganyam bambu.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Pada saat analisis data, dapat kembali lagi ke lapangan untuk mencari tambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali. Suyanto dan Sutinah (2006), mengatakan pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasikan atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitiannya. Adapun kegiatan pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.7.1 Editing Data

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain. Data yang di dapatkan oleh peneliti dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data terkumpul peneliti melakukan penyuntingan kata-kata yang berasal dari wawancara supaya layak untuk disajikan. Kemudian dari observasi peneliti coba deskripsikan lewat tulisan sehingga nantinya peneliti mudah menggabungkan dan menyajikan. Ada beberapa dokumen yang memang tidak lengkap untuk tidak disajikan dan memilih data yang memang diperlukan saja untuk menunjang hasil dari penelitian tersebut.

3.7.2 Interpretasi Data

Interpretasi data digunakan untuk mencari makna dan hasil penelitian dengan jalan tidak hanya menjelaskan atau menganalisis data yang diperoleh, tetapi data diinterpretasikan untuk kemudian mendapatkan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Setelah data terkumpul dan di edit oleh peneliti, peneliti mencoba untuk menginterpretasikan data yaitu dengan mencocokkan atau menggabungkan antara hasil wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian dianalisis dan dibahas sehingga peneliti menghasilkan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

3.8 Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dari beberapa metode yaitu metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, maka langkah selanjutnya adalah mengumpulkan dan mengolah data yang sudah diperoleh menggunakan cara klarifikasi atas segala jawaban agar data yang sudah didapatkan mampu dianalisa sesuai dengan data lapangan, analisis ini memakai teknik analisis kualitatif yang digambarkan menggunakan kata ataupun kalimat selanjutnya dipisahkan sesuai kategori agar dapat menarik kesimpulan akhir penulis menggunakan metode berfikir secara induktif.

Metode induktif merupakan metode-metode yang digunakan untuk mengambil kesimpulan dari penjelasan-penjelasan bersifat khusus lalu yang bersifat umum. Dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi. Maka dari itu perlu diingat dengan teliti seperti yang telah di sampaikan semakin lama waktu penelitian dilapangan maka jumlah data yang didapatkan akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Agar perlu dilakukan penganalisisan data dengan reduksi data, mereduksi data merupakan mengambil intisari, memilih hal yang terpenting, dicari dengan tema dan pola, dengan seperti itu data yang telah direduksikan akan memberikan gambaran secara jelas dan memudahkan peneliti untuk mendapatkan dan mengumpulkan data.

Perolehan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti dapat disimpulkan dalam metode deskriptif yaitu metode yang dipakai dalam pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan analisis dan kesimpulan tersebut maka akan menjawab segala permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

3.9 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data digunakan untuk membuktikan sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Melalui keabsahan data kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai. Teknik triangulasi dipilih dalam penelitian ini karena dalam menggunakan beberapa sumber data yang berasal dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Menurut Moleong dalam Kurniawan (2017: 51) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan triangulasi dengan cara: (1) Mengecek data yang telah di peroleh dari berbagai sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui pengamatan, wawancara. (2) Kemudian membandingkan hasil wawancara dengan dokumen-dokumen yang bersangkutan. Dalam hal ini peneliti menggunakan prosedur membandingkan antara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jika hasil wawancara, observasi dan dokumentasi satu dengan yang lain sesuai maka keabsahan data yang di pertanggungjawabkan. Namun jika hasilnya tidak sesuai maka peneliti melakukan hasil observasi sebagai sumber data.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1. Kondisi Desa

4.1.1 Sejarah berdirinya Desa Tulung Agung

Desa Tulungagung terbentuk pada tahun 1918 yang merupakan program marga dari Pemerintah Hindia Belanda pada saat berkuasa dibelahan Bumi Nusantara ini. Pembukaan Desa Tulungagung waktu itu dipimpin oleh seorang pendatang dari Pulau Jawa yang bernama Bapak Sopawiro.

Bapak Sopawiro dibantu teman- temannya yang berasal dari Pulau Jawa, yang tepatnya dari Purworejo, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah saat ini. Karenadengan kondisi/keadaan saat itu masih banyak pohon besar yang dipandang angker dan binatang buas yang membahayakan, maka Bapak Sopawiro dengan izin Pemerintah Hindia Belanda, berangkat ke Jawa Timur dan mengambil orang-orang dari Desa Tulungagung di Karesidenan Kediri sebanyak 100 orang. Untuk mengenang orang-orang yang membantu Bapak Sopawiro yang datang dari desa Tulungagung, maka desa inipun dinamai sesuai dengan asal Teman- teman Bapak Sopawiro yaitu Tulungagung. Desa Tulungagung inipun sebagian besar penduduknya awal mulanya berasal dari Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Desa/ Pekon Tulungagung dibagi dalam 6 (enam) dusun, yang masing-masing dusun dipimpin oleh Kepala Dusun (KaDus) yang oleh warga dikenal dengan sebutan Bayan. Kebayan atau Rukun Warga (RW) memiliki rekan kerja yaitu RT (rukun tetangga).

Pada sekitar tahun 1955 warga Desa Tulungagung juga membuka dan menebang hutan di Utara Desa Mataram, warga mengenal dengan sebutan Lor Kali, di lahan ini diber nama Tri Tunggal. Tri Tunggal pun dijadikan dusun ke-7 pada waktu itu. Seiring waktu sekitar tahun 1989 saat desa Tulungagung dipimpin Oleh Bapak M.Thowiluddin, dusun Tri Tunggal memisahkn diri dari Desa Tulungagung dan menjadi desa mandiri.

Desa Tulungagung berada diantara Desa-desa yang lain, yang antara lain disebelah Utara berbatasan dengan Desa Mataram, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tegalsari, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Wonodadi, sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bulurejo.

4.1.2 Demografi

a. Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Tulungagung terletak diantara :

Sebelah Utara	: Pekon Mataram
Sebelah Selatan	: Pekon Wonodadi
Sebelah Barat	: Pekon Bulurejo
Sebelah Timur	: Pekon Tegalsari

b. Luas Wilayah Desa

1. Desa Tulungagung: 625 Ha
2. Pemukiman : 277,75 Ha
3. Pertanian/Sawah : 282 Ha
4. Ladang/tegalan : 60 Ha
5. Perkantoran : 0,25 Ha
6. Makam : 2 Ha
7. Lahan lainnya : 3 Ha

c. Orbitasi

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 3 KM
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 10 menit
3. Jarak ke ibu kota kabupetan : 2 KM
4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 15 Menit

d. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

1. Kepala Keluarga : 1349 KK
2. Laki-laki : 2256 Orang
3. Perempuan : 2454

4.1.3 Visi dan Misi Desa Tulung Agung

a. Visi Desa

Bahu membahu membangun Desa Tulung Agung yang lebih maju dan masyarakat sejahtera

- 1) Nilai-nilai yang melandasi Selama bertahun-tahun desa tulung agung menyandang gelar sebagai desa kategori desa merah atau miskin. Sebuah sebutan yang sangat tidak membanggakan padahal sumber daya yang adacukup memadai, hanya saja penanganannya kurang maksimal. Sebagian besar warga petani dan buruh tani juga ada yang memelihara hewan ternak meski dalam skala kecil, biasanya hanya digunakan untuk investasi jangka pendek.
- 2) Makna yang terkandung
 - a) Terwujudnya : Terkandung didalamnya peran pemerintah dalam mewujudkan Desa Tulung Agung yang mandiri secara ekonomi.

- b) Desa Tulung Agung adalah salah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensinya dalam sistem pemerintahan yang ada diwilayah Desa Tulung Agung.
- c) Mandiri adalah suatu kondisi kehidupan yang kreatif, inovatif, produktif, dan partisipatif sehingga mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.
- d) Pertanian bahwa sektor pangan adalah hal utama dalam perekonomian, sehingga tidak akan terjadi rawan pangan di Desa Tulung Agung.

b. Misi Desa

- 1) Memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan Untuk meningkatkan SDM melalui pendidikan formal maupun informal. Dan untuk mendukung kesehatan seperti puskesmas.
- 2) Bekerja sama dengan petugas penyuluh lapangan untuk meningkatkan hasil pertanian.
- 3) Meningkatkan usaha pertanian
- 4) Meningkatkan dan mengelola pendapatan asli desa.
- 5) Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan otonomi daerah.
- 6) Bersatu dan bergotong royong menjadikan Desa Tulung Agung yang bersih, aman, agamis, adil, dan makmur.

4.1.4 Keadaan Sosial

a. Pendidikan

1. SD/ MI : 1241 Orang
2. SLTP/ MTs : 2079 Orang
3. SLTA/ MA : 701 Orang
4. S1/ Diploma : 315 Orang
5. Putus Sekolah : 351 Orang
6. Buta Huruf : 2

b. Lembaga Pendidikan

1. Gedung TK/PAUD : 3 buah/ Lokasi di Dusun II dan Dusun III
2. SD/MI : 4 buah/ Lokasi di Dusun II, Dusun III dan Dusun IV
3. SLTP/MTs : 1 buah/ Lokasi di Dusun III
4. SLTA/MA : 1 buah/ Lokasi di Dusun III
5. Lain-lain : 0 buah/ Lokasi di Dusun

c. Kesehatan

1. Kematian Bayi

1. Jumlah Bayi lahir pada tahun ini : 21 orang
2. Jumlah Bayi meninggal tahun ini : 0 orang

2. Kematian Ibu Melahirkan

1. Jumlah ibu melahirkan tahun ini : 13 orang
2. Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini: 0 orang

3. Cakupan Imunisasi

1. Cakupan Imunisasi Polio 3 : 32 orang
2. Cakupan Imunisasi DPT-1 : 32 orang
3. Cakupan Imunisasi Cacar : 43 orang

4. Gizi Balita

1. Jumlah Balita : 35 orang
2. Balita gizi buruk : - orang
3. Balita gizi baik : - orang
4. Balita gizi kurang : - orang

5. Pemenuhan Air Bersih

1. Pengguna sumur galian : 1229 KK
2. Pengguna air PAM : 84 KK
3. Pengguna sumur pompa : 38 KK
4. Pengguna sumur hidran umum : 0 KK
5. Pengguna air sungai : 0 K

d. Keagamaan**a. Data Keagamaan Tahun 2021**

Jumlah Pemeluk :

- Islam : 4655 orang
- Katolik : 52 orang
- Kristen : 0 orang - Hindu : 3 orang
- Budha : 0

b. Data Tempat Ibadah

Jumlah tempat ibadah :

- Masjid / Musholla : 18 buah
- Gereja : 0 buah
- Pura : 0

4.1.5 Keadaan Ekonomi

1. Pertanian

Jenis Tanaman :

1. Padi sawah : 282 ha
2. Padi Ladang : 0 ha
3. Jagung : 20 ha
4. Palawija : 42 ha
5. Tembakau : 0 ha
6. Tebu : 0 ha
7. Kakao/ Coklat : 5 ha
8. Sawit : 0 ha
9. Karet : 4 ha
10. Kelapa : 15 ha
11. Kopi : 0 ha
12. Singkong : 5 ha
13. Lain-lain : 2 ha

2. Peternakan

Jenis ternak :

1. Kambing : 550 ekor
2. Sapi : 350 ekor 3. Kerbau : 0 ekor
3. Ayam : 10.000 ekor
4. Itik : 1.000 ekor
5. Burung : 100 ekor
6. Lain-lain : 400 ekor

3. Perikanan

1. Tambak ikan : 5 ha
2. Tambak udang : 0 ha
3. Lain-lain : 2 h

4. Struktur Mata Pencaharian

Jeis Pekerjaan :

1. Petani : 998 orang
2. Pedagang : 47 orang
3. PNS : 137 orang
4. Tukang : 105 orang
5. Guru : 57 orang
6. Bidan/ Perawat : 7 orang
7. TNI/ Polri : 5 orang
8. Pesiunan : 73 orang
9. Sopir/ Angkutan : 5 orang
10. Buruh : 583 orang
11. Jasa persewaan : 11 orang
12. Swasta : 31 orang

4.2. Kondisi Pemerintahan Desa

4.2.1 Lembaga pemerintahan

Jumlah aparat Pekon :

1. Kepala Desa : 1 orang
2. Sekretaris Desa : 1 orang
3. Perangkat Desa : 12 orang
4. BHP : 9 oran

4.2.2 Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :

1. LPM 1
2. PKK 1
3. Posyandu 7
4. Pengajian : 14 Kelompok
5. Arisan : 21 Kelompok
6. Simpan Pinjam : 12 Kelompok
7. Kelompok Tani : 8 Kelompok
8. Gapoktan : 1 Kelompok
9. Karang Taruna : 1 Kelompok
10. Risma : 18 Kelompok
11. Ormas/LSM : 0 Kelompok
12. Lain-lain : 0 Kelompok

4.2.3 Pembagian Wilayah

Nama Dusun :

1. Dusun I : Jumlah 3 RT
2. Dusun II : Jumlah 4 RT
3. Dusun III : Jumlah 5 RT
4. Dusun IV : Jumlah 2 RT
5. Dusun V : Jumlah 2 RT
6. Dusun VI : Jumlah 3 RT

4.2.4 Struktur Organisasi Desa Tulungagung

NAMA-NAMA APARAT DESA :

Kepala Desa	: DARMAWAN
Sekretaris Desa	: RUSDIAN ALI
Kepala Urusan Keuangan	: SIGIT YULIANSYAH
Kepala Urusan Perencanaan	: YANI SAFRUDIN
Kepala Urusan TU dan Umum	: AULIA ROHMANI
Kepala Seksi Kesra	: FADIA ANZUN UTARI
Kepala Seksi Pemerintahan	: ARI EKO SAPUTRO
Kepala Seksi Pelayanan	: SANEN

Kepala Dusun:

- 1.Dusun I . : KIRNADI
- 2.Dusun II : DENI JAYANTO
- 3.Dusun III : EKO PRIYADI
- 4.Dusun IV : SOBIRIN
- 5.Dusun V : NUROHMAN
- 6.Dusun VI : MUCHTAR

4.2.5 Nama-Nama Anggota Badan Himpunan Pedesaan(BHP)

Ketua	: SUBROTO
Wakil Ketua	: AHMAD STAMRUL FUADI
Sekretaris	: AINUN HASAN
Anggota :	

- a. LUKMAN SANTOSO
- b. NGATIJO
- c. PONIRAN
- d. M. AGUS SAPUTRO
- e. SUWAHYO
- f. SUTIYAH

4.2.6 Prasarana Dan Sarana Desa

Tabel 3. Prasarana dan Sarana Desa Tulung Agung

No.	Jenis Prasarana dan Sarana Desa	Jumlah	Keterangan
1.	Kantor Desa	1	
2.	Gedung SLTA / MA	1	
3.	Gedung SLTP / MTs	1	
4.	Gedung SD	3	
5.	Gedung MI	1	
6.	Gedung Paud	1	
7.	Gedung TK	2	
8.	Masjid	7	
9.	Musholla	11	
10.	Pasar Desa	-	
11.	Poskesdes	1	
12.	Gedung Posyandu	1	
13.	Panti PKK	-	
14.	Poskamling	25	
15.	Jembatan	-	
16.	Gedung TPQ	10	

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Gedung SLTA masih diperlukan di Desa Tulungagung karena jumlah siswa yang tamatan SLTP relatif banyak dan belum semua terakomodasi dalam SLTA terdekat.
2. Pasar Desa tidak ada, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat biasanya mereka datang ke pasar tradisional yang ada di Desa Gadingrejo
3. Secara umum prasarana dan sarana yang ada di Desa belum cukup lengkap mengingat jumlah penduduk yang besar yaitu 4.412 jiwa.

4.2.7 Pemerintahan Umum

Tabel 4. Pemerintahan Umum Desa

No.	Uraian	Keberadaan		Keterangan
		Ada	Tidak	
1.	Pelayanan	Ada	-	
2.	Kependudukan	Ada	-	
3.	Perijinan	-	Tidak	
4.	Pasar tradisional	-	Tidak	
5.	Ketentraman dan tibum	Ada	-	

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelayanan kependudukan dilaksanakan setiap hari jam kerja kadang kalau ada juga penduduk yang datang pada sore atau malam hari, hal ini bisa dimaklumi karena mayoritas penduduk adalah petani atau buruh tani sehingga kesibukan bekerja seharian. Pemahaman mengenai jam kerja kantor masih kurang.
2. Ada 3 (tiga) lokasi pemakaman di Desa Tulungagung Tidak ada tim khusus yang menangani hal ini. Prosesi pemakaman dipimpin oleh ulama setempat dan dilaksanakan secara gotong royong oleh warga.
3. Perijinan diantaranya adalah ijin keramaian dan ijin tinggal.
4. Ijin keramaian diwajibkan bagi kegiatan yang bisa mendatangkan massa dalam jumlah banyak. Misalnya hiburan rakyat, ketoprak dan orkes. Ijin ini selain ke pemerintah Pekon juga diteruskan ke MUSPIKA.
5. Ijin tinggal diberlakukan kepada warga asing yang bertamu lebih dari 24 jam atau menginap terutama jika bukan keluarga dekat dengan warga setempat.
6. Pasar tradisional tidak ada, warga biasa datang ke pasar tradisional yang ada di Desa Gadingrejo
7. Satuan linmas memiliki anggota sebanyak 30 personel aktif dan siap sewaktu-waktu jika ada kegiatan yang bersifat lokal atau skala kecil. Untuk pengamanan skala sedang dan besar linmas dibantu dari POLSEK dan KORAMIL.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran kepala Desa sebagai motivator, Kepala Desa seseorang yang memberikan motivasi untuk mencapai suatu tujuan agar pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai yang diharapkan. Kepala Desa sudah melaksanakan tugasnya sebagai motivator di mana Kepala Desa selalu memberikan motivasi serta masukan-masukan dan dukungan dengan memberi semangat kepada warga dan aparatur pemerintah di kantor desa, selain dari pada itu kepala desa adalah seorang pemimpin yang mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi kepada masyarakat desa, misalnya memotivasi warga untuk selalu menjaga dan memelihara sarana dan prasarana Desa dan juga menjaga kebersihan lingkungan sekitar, dengan cara gotong royong yang dilakukan bersama-sama.
2. Peran kepala Desa sebagai fasilitator, kepala Desa dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator dalam hal memfasilitasi atau melengkapi kebutuhan yang di perlukan dalam proses pembangunan sudah cukup maksimal karena dari hasil wawancara di atas ada sebagian warga sangat terbantu dengan adanya pembagian bibit tanaman yang bertujuan untuk dapat meningkatkan perekonomian warga dan juga memudahkan atau meringankan pekerjaan petani, tetapi kepala Desa juga memberikan

Fasilitas tempat untuk para ibu-ibu melakukan kegiatan belajar bersama menganyam bambu, dan juga kepala Desa melakukan perbaikan perbaikan prasarana desa seperti kantor desa, perbaikan deker, masjid dan jalan.

3. Peran kepala Desa sebagai mobilisator Yaitu kepala desa menggerakkan atau mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa, misalnya melakukan gotong royong, memperbaiki tempat ibadah dengan cara melalui pengumuman di mesjid atau melalui perantara kaur desa yaitu kepala dusun Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam suatu kegiatan ada berbagai cara yang di lakukan pemerintah Desa semua itu di lakukan guna memperlancar pelaksanaan pembangunan di Desa dan agar warga Desa Tulung Agung Terbiasa akan Kegiatan-kegiatan desa yang bersifat positif.

6.2 Saran

1. Peningkatan peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat harus lebih dioptimalkan lagi, agar program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa semakin berkembang dan agar warga masyarakat desa lebih berdaya dalam tatanan sosial terlebih dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat
2. Peran kepala desa dalam melakukan pemberdayaan perlu ditingkatkan inisiatif yang berasal internal pemerintah desa itu sendiri seperti menjadi program pemerintah desa, tidak sebatas pada kerja sama dengan pemerintah kabupaten melalui dinas terkait, agar tujuan pemberdayaan masyarakat akan lebih efektif dan berlangsung secara terus menerus, tanpa terhenti karena menunggu anggaran dari pemerintah kabupaten.

3. Peningkatan peran yang perlu di optimalkan lagi mengenai sumber daya manusianya yang di lihat dari tingkat pendidikan masyarakat Desa Tulung Agung yang masih di bawah rata rata,itu sebabnya perlu adanya pendekatan secara langsung dan juga adanya sosialisasi tentang pendidikan dan bantuan yang langsung di berikan oleh pemerintah desa khususnya yang duduk di bangku SMA agar masyarakat yang ada bisa mendapatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karna itu juga menjadi penunjang peran dari seorang kepala desa dalam mnjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan dari suatu desa.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Deskriptif, S., Kepemimpinan Kepala, K., Sendangtirto, D., Berbah, K., Sleman, K., & Diy, P. (2017). *Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*.
- Gusti Bagus Arjana, *Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 227
- Hakimi, (2020). *Strategi, Kepemimpinan dan Motivasi Kerja*. Jakarta : Guepedia
- Malihah, N., & Achiria, S. (2019). *Peran Ekonomi Kreatif Dalam Pemberdayaan Industri Kerajinan Bambu*. Maqdis : *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 4(1), 69.
- Minahasa, M. K. (n.d.). *Pembangunan Di Desa Tateli Satu Kecamatan*.
- Muhammad Alfiat. (2018). *Faktor-Faktor Keberhasilan Kepemimpinan Kepala Desa Transtanjungan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan Periode 2015-2017 Skripsi*.
- Probosiwi, R. (2016). *Otonomi dan Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat*. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 40(3), 287–298.
- Sarwono, Sarlito W., 2015, *Teori-teori Psikologi Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada,
- Sarpin. (2014). *Peran Kepala Desa dalam Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Genjor Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro)*. *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 4(2), 1–9.
- Septiana Nur Utami. (2011). *Peranan Kepala Desa Sebagai Motivator Pembangunan Desa Penelitian*. *Journal Kemasyarakatan*, 1, 6–151.

- Setiawan, A. (2013). *Peran Kepala Desa Terhadap Swadaya*. *E Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(3), 1095–1109.
- Sugiono, P. D. (2016). *Pemberdayaan Ekonomi*. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Suwardianto, S. (2015). *Peranan Kepala Desa Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman*. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(Juli), 1–171.
- Hasanah, R. (2020). *Peran Kepala Desa Sebagai Motivator Pembangunan Di Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember*.
- Sinambela, Lijan Poltak, dkk. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS.
- Andarmoyo, Sulisty. 2012. *Keperawatan Keluarga Konsep Teori, Proses dan Praktik Keperawatan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Barbara, Koziar, 2008, *Fundamental of Nursing, Seventh Edition, Vol.2*, Jakarta: EGC.
- Suriakusumah dan Prayoga Bestari (2009). *Sistem Pemerintahan Daerah*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan.
- Saparin, Sumber. (1986). *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kompri. (2015). *Motivasi Pembelajaran Perspektif Guru dan Siswa*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset

Buku:

Bintoro Tjokroamidjojo, (1996). Perencanaan Pembangunan. Jakarta : PT TOKO GUNUNG AGUNG

Website:

<https://doi.org/10.15548/maqdis.v4i1.212>

<https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/2461/4/TFLACSO2010ZVNBA.pdf>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pringsewu#Potensi_pertanian,_perkebunan,_perikanan,_dan_peternakan

<http://repository.radenintan.ac.id/11506/2/PUSAT%201%202.pdf>

<http://etheses.iainkediri.ac.id/299/3/BAB%20II.pdf>

Dokumen:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa